

KONTRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK) TERHADAP PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN MANOKWARI

*(The Contribution of IPHHK to the Socio-Economic Condition of the Indigenous
People in Manokwari Regency)*

KORNELIS MANWAS¹, OBED N. LENSE^{2✉}, ANTON SILA SINERY²

¹Mahasiswa Program Studi Magister Kehutanan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Papua Manokwari, Papua Barat 98314

²Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Papua, Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari, Papua Barat 98314

✉Penulis Korespondensi: Email o.lense@unipa.ac.id

Diterima: 06 Agustus 2022 | Disetujui: 15 Sept 2022

Abstrak. Kewajiban IPHHK yang berada di Kabupaten Manokwari selama periode 2017-2021 telah menyumbangkan devisa bagi negara, namun disisi lain dengan keberadaannya apakah memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan sosial ekonomi masyarakat yang berada di dalam dan sekitar areal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran serta IPHHK terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat hukum adat (MHA) masih relatif rendah (48%). Hal ini diduga karena secara legal para pemegang IPHHK tidak punya kewajiban khusus untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Hal ini diperparah lagi dengan pola kemitraan yang diterapkan oleh hampir semua pemegang IPHHK dalam pemungutan dan pengelolaan hasil hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para mitra terkesan tidak peduli apalagi berkontribusi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar areal dalam hal ini MHA. Hasil analisis lanjutan menunjukkan terdapat korelasi yang erat antara peran serta IPHHK dan kondisi sosial ekonomi MHA.

Kata Kunci: Peran serta, IPHHK, sosial ekonomi, masyarakat hukum adat

***Abstract.** The IPHHK in Manokwari Regency during the 2017-2021 period has contributed to country's income. However, there is no evidence that it has a significant impact on improving the socio-economic community in the area yet. The results showed that the role of IPHHK in improving the socio-economic conditions of indigenous peoples (MHA) was still relatively low (48%). This is presumably because IPHHK holders do not have a special obligation to empower communities around the forest. This is made worse by the partnership scheme applied by almost all IPHHK holders in the collection and management of forest's product. The results showed that the partners seemed had less contribute to the socio-economic conditions of the community around the area, in this case MHA. The results of correlation analysis show that there is a significant correlation between the participation of IPHHK and the socio-economic conditions of MHA.*

Keywords: Contribution, IPHHK, Social Economic, Indigenous People

PENDAHULUAN

Papua Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat pulau

Papua, dengan jumlah penduduk sekitar 1.069.000 jiwa, luas wilayah sekitar 10 juta hektar, dimana 9.377.855,06 ha merupakan hutan dan 1.046.000 ha merupakan lahan

gambut (Incas 2015). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 mencatat Papua Barat menjadi provinsi dengan persentase kawasan hutan terluas yaitu 87,3% dari luas daratan Papua Barat sebesar 9,6 juta hektar, dengan luas hutan mencapai 8,39 juta hektar. Triestini et. al. (2020), pada tahun 2018 sektor kehutanan di Provinsi Papua Barat merupakan penyumbang devisa negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari kegiatan pemanfaatan hutan oleh IUPHHK yang bersumber pada PSDH dan DR selama periode 2010–2018 berkisar Rp. 73.875.552.670–Rp. 144.308.646.359 per tahun yang memiliki rata-rata per tahun Rp. 110.764.876.329, sedangkan IPHHK pada tahun 2017 menyumbangkan PNBP sebesar Rp. 55.538.686.752 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 83.964.683.378 (Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat 2022).

Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 783/II/2014, Kabupaten Manokwari memiliki luas kawasan hutan ± 318.437 ha, berupa hutan konservasi 19.211 ha, hutan lindung 62.391 ha, fungsi produksi 44.097 ha. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat tahun 2022, Kabupaten Manokwari menyumbangkan PNBP dari sektor kehutanan pada periode tahun 2017-2021 sebesar Rp. 193.944.060 dari kegiatan pemanfaatan hutan oleh IPHHK yang diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat dengan jumlah pemegang IPHHK pada tahun 2018 sebanyak 68 izin dan untuk jumlah IPHHK yang diterbitkan dari tahun 2017-2018 berjumlah 156 izin. Sejak 2017 hingga 2021, Kebijakan IPHHK Perorangan dan Koperasi di Papua Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, namun pada tanggal 1 April 2021 peraturan tersebut tidak berlaku, sehingga kebijakan IPHHK di Provinsi Papua

Barat tidak diberlakukan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan produksi. Kewajiban IPHHK yang berada di Kabupaten Manokwari selama periode 2017-2021 telah menyumbangkan devisa bagi negara, namun disisi lain dengan keberadaannya apakah memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan sosial ekonomi masyarakat yang berada di dalam dan sekitar areal. Berdasarkan paparan di atas, perlu adanya kajian tentang peran serta pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) dalam peningkatan sosial ekonomi Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Manokwari.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan tiga Distrik (Kecamatan) yang mencakup empat belas Kampung dengan jumlah total IPHHK sebanyak 58 unit. Penelitian ini berlangsung selama ± 2 bulan (Juni – Juli) tahun 2022. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (Moleong 2007), dengan Teknik survei dan observasi langsung. Penentuan jumlah responden masyarakat hukum adat (MHA) terpilih adalah menggunakan menggunakan rumus Slovin:

$$n = N / (1 + N.(e)^2)$$

Dimana :

- n = Jumlah sampel
- N = Jumlah total populasi
- e = Batas toleransi error

Jumlah responden terpilih adalah 56 KK yang merupakan Masyarakat Hukum Adat dan tersebar secara proporsional dan dipilih secara acak di tiap kampung target (Tabel 1).

Tabel 1. Pedoman menginterpretasikan koefisien korelasi (Sugiyono 2014).

Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*in dept interview*) yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang tersedia. Informasi yang diperoleh kemudian dicatat dalam jurnal harian dan direkam dengan recorder. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap berbagai aktivitas masyarakat dalam situasi yang bisa diamati. Hasil pengamatan dicatat dalam buku harian dan diabadikan dalam bentuk foto.

Data yang terkumpul selanjutnya disusun berdasarkan skala Guttman (Sugiyono 2013). Skor masing-masing jawaban responden kemudian dijadikan dalam satu tabel. Selanjutnya secara umum dapat disimpulkan dengan cara merata-rata jawaban pernyataan dan kemudian rata-rata jawaban tersebut dimasukkan ke dalam interval kelas yang terbagi menjadi 3 kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah dengan rumus sebagai berikut:

Interval = Alternatif jawaban tertinggi - Alternatif jawaban terendah / \sum alternatif jawaban

Analisis korelasi untuk mengetahui hubungan keberadaan izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) terhadap peningkatan sosial ekonomi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manokwari menggunakan metode korelasi rank Spearman (Sugiyono 2016). Analisis data dilakukan untuk menentukan model yang dirumuskan dengan menggunakan program SPSS sebagai alat bantu. Berikut rumus analisis korelasi tersebut yang digunakan (Sugiyono 2016):

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum b_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan:

P = Koefisien korelasi rank spearman

bi = Ranking data variabel Xi-Yi

n = Jumlah responden

Tingkat hubungan antar variabel adalah berdasarkan tabel 2 berikut:

Tabel 2. Jumlah responden masyarakat hukum adat

No	Lokasi Penelitian		\sum KK	Slovin	\sum Sampel (KK)
	Distrik	Kampung			
1	Sidey	Sidey Baru	61	61 x 10%	6
		Saray	32	32 x 10%	3
		Sidey Jaya	59	59 x 10%	6
		Wamnowi	32	32 x 10%	3
2	Masni	Kali Merah	24	24 x 10%	2
		Makwan	52	52 x 10%	5
		Muara Wariori	52	52 x 10%	5

No	Lokasi Penelitian		Σ KK	Slovin	Σ Sampel (KK)
	Distrik	Kampung			
3	Manokwari Utara	Sibuni	21	21 x 10%	2
		Prafi Barat	36	36 x 10%	4
		Singgimeba	13	13 x 10%	1
		Meinyumfoka	37	37 x 10%	4
		Inoduas	63	63 x 10%	6
		Bremi	33	33 x 10%	3
		Sayro	45	45 x 10%	5
Total			560		56

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Serta IPHHK Terhadap Peningkatan Kondisi Sosial Ekonomi MHA

Hasil penelitian terhadap peran serta IPHHK terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat hukum adat (MHA) menunjukkan bahwa kontribusi pemegang IPHHK masih relatif rendah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa hanya sebanyak 52% dari jumlah IPHHK yang belum berkontribusi terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi MHA. Hal ini diduga karena tidak adanya kewajiban dan tanggung jawab khusus IPHHK terhadap aspek sosial ekonomi MHA. Merindakang et. al. (2022) mengatakan bahwa pemegang izin IPHHK di Provinsi Papua Barat hanya memiliki dua kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan melaksanakan penanaman pada tegakan hidup. Dalam penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran serta pemegang IPHHK dalam peningkatan sosial ekonomi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manokwari bukan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin. Selain itu, secara spesifik hasil penelitian menemukan bahwa kurangnya peran serta IPHHK terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat hukum adat diduga salah satu penyebabnya adalah pola kemitraan

yang dilakukan pemegang IPHHK. Hasil wawancara dengan pemegang IPHHK diketahui bahwa Sebagian besar (79%) pemungutan dan pengolahan kayu IPHHK diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada rendahnya distribusi manfaat yang didapat oleh masyarakat hukum adat. Pola kemitraan ini diduga menghilangkan tanggung jawab IPHHK terhadap aspek ekonomi dan sosial masyarakat adat. Peneliti menemukan sistem kemitraan pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) dengan pihak-pihak yang dapat membantu dalam pengolahan hasil hutan kayu. Kemitraan merupakan suatu bentuk kerja sama dua pihak atau lebih membentuk ikatan kolaboratif berdasarkan kesepakatan dan rasa saling membutuhkan untuk meningkatkan kemampuan dan efisiensi bidang atau tujuan bisnis tertentu guna mencapai hasil yang lebih baik. Pemegang IPHHK melakukan kemitraan atau kerja sama dengan pembagian hasil kubikasi per jenis kayu olahan dari areal tebangan. Kemitraan dengan pembagian hasil kubikasi per jenis kayu olahan dari areal tebangan menerima harga per kubikasi sebesar Rp. 200,000 per jenis Rimba Campuran atau kayu putih, Rp. 300,000 untuk jenis matoa serta Rp. 400,000 untuk jenis merbau atau kayu besi. Bakarbesy (2018), dalam penelitiannya di

Distrik Manokwari Utara Kabupaten Manokwari menyatakan bahwa masyarakat lebih memilih untuk menjalin kerja sama dengan pihak kedua (pengusaha kayu) dalam kegiatan pemungutan hasil hutan kayu di hutan produksi. Menurut Kaihatu (2006), terdapat lima prinsip dalam kemitraan meliputi kesetaraan (*equality*), transparansi (*transparency*), pendekatan berorientasi hasil (*result oriented approach*), tanggung jawab (*accountability*), dan saling melengkapi (*complementary*). Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa 79% responden yang melakukan kemitraan dalam bentuk pembayaran kubikasi per jenis merasakan tidak adanya prinsip kemitraan oleh pihak bermitra dalam hal

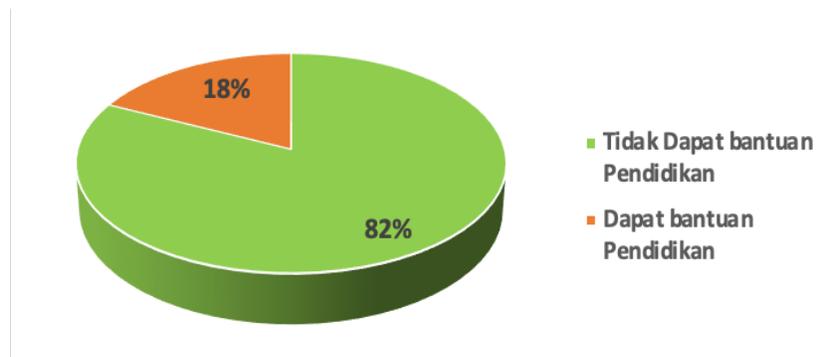
pembayaran per tiga bulan hasil olahan kayu yang telah dikeluarkan dengan membandingkan harga kubikasi yang diterima dengan harga penjualan kayu per jenis oleh stan kayu yang tinggi. Dalam penelitian Paririe et. al. (2019), jalur perdagangan kayu dari Distrik Manokwari Utara dijual ke pasar lokal di Kabupaten Manokwari Utara dan Kota Manokwari, dengan margin keuntungan tertinggi oleh stan kayu ke pengguna akhir di Kota Manokwari dan sekitarnya. Tabel di bawah ini, menunjukkan bahwa terdapat kenaikan harga pada periode 2018- 2021 untuk kemitraan dengan pembagian hasil kubikasi per jenis kayu olahan dari areal tebangan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kenaikan harga pembagian hasil kubikasi per jenis kayu olahan dari areal tebangan perioden 2018 – 2021

Jenis	Harga Kubikasi (Rp) per Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Rimba Campuran	200,000	200,000	200,000	300,000
Matoa	300,000	300,000	300,000	400,000
Merbau	400,000	400,000	400,000	500,000

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2018-2020 tidak terdapat kenaikan harga pada pembagian hasil kubikasi per jenis kayu olahan dari areal tebangan yaitu Rp. 200,000 per jenis rimba campuran, Rp. 300,000 per jenis matoa dan Rp. 400,000 per jenis merbau. Sedangkan tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp. 300,000 per jenis rimba campuran, Rp. 400,000 per jenis matoa dan Rp. 500,000 per jenis merbau.

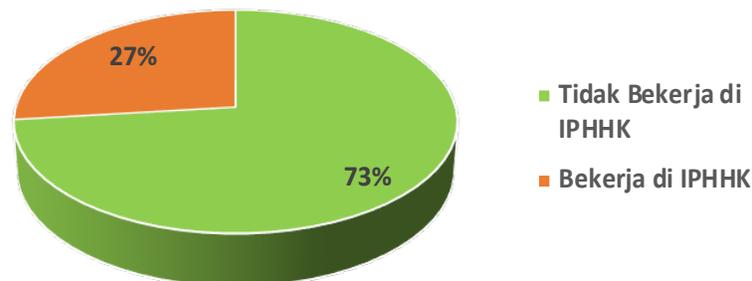
Bila dilihat secara terpisah, rendahnya peran serta pemegang IPHKK dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat hukum adat diduga berkaitan erat dengan rendahnya kontribusi peran serta pemegang IPHKK terhadap bantuan pendidikan dengan persentase 18% (Gambar 1), bantuan mendapatkan pekerjaan dengan persentase 21,43% (Gambar 2) dan bantuan peningkatan pendapatan dengan persentase 37,50% (Gambar 3).



Gambar 1. Peran serta pemegang izin IPHHK periode 2018-2021 terhadap pendidikan anak masyarakat hukum adat di Kabupaten Manokwari

Berdasarkan Gambar 1, kontribusi IPHHK terhadap peningkatan pendidikan/sekolah anak-anak pada wilayah penelitian masih relatif sangat rendah. Bantuan yang diterima MHA adalah berupa biaya sekolah, namun hanya lingkungan keluarga dekat pemegang IPHHK dan tidak diberikan kepada semua masyarakat yang berdomisili di kampung tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemegang IPHHK bahwa alasan tidak memberikan

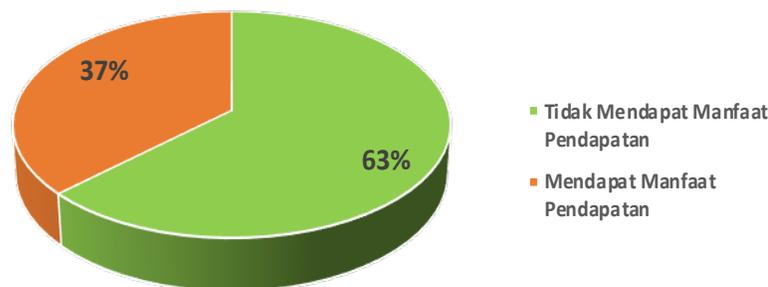
bantuan pendidikan kepada Masyarakat Hukum Adat yang berada di wilayah kerja IPHHK karena masih memiliki tanggungan keluarga dan bukan kewajiban yang harus dipenuhi. Selanjutnya penelitian ini juga menemukan rendahnya kesempatan bekerja MHA di IPHHK (Gambar 2). Sebagian kecil MHA yang mendapat bantuan pekerjaan adalah hanya sebagai buruh pikul kayu hasil tebangan pada IPHHK.



Gambar 2. Peran serta pemegang izin IPHHK periode 2018-2021 terhadap pekerjaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Manokwari

Rendahnya kontribusi dalam bantuan pekerjaan bagi Masyarakat Hukum Adat yang berada di wilayah kerja IPHHK diduga karena

dalam pengambilan hasil hutan berupa kayu, pemegang IPHHK bekerja sama atau bermitra kepada stan kayu yang berada di Kabupaten Manokwari (Gambar 1).



Gambar 3. Peran serta pemegang izin IPHHK periode 2018-2021 terhadap pendapatan masyarakat hukum adat di Kabupaten Manokwari

Gambar 3 menunjukkan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan bagi Masyarakat Hukum Adat yang berada di wilayah kerja IPHHK juga masih relatif rendah. Skema kemitraan (pihak ketiga) dalam pemungutan hasil hutan kayu diduga juga masih menjadi penyebab utama.

Hubungan Antara Peran Serta IPHHK dan Peningkatan Kondisi Sosial Ekonomi MHA

Analisis dilakukan terhadap peran serta pemegang IPHHK dan peningkatan sosial ekonomi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manokwari menunjukkan bahwa terdapat hubungan korelasi keberadaan IPHHK terhadap peningkatan sosial ekonomi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manokwari (nilai korelasi Pearson hitung (0,313) > nilai R tabel (0,2586). Arah hubungan antara variabel yang dianalisis, korelasinya dapat berupa hubungan positif atau negatif (Budiwanto 2014). Berdasarkan nilai korelasi Pearson Y dan X menunjukkan hubungan yang positif yaitu 0,313 dengan derajat hubungan yang lemah. Sugiyono (2014), bahwa korelasi Pearson 0,20 s/d 0,399 disimpulkan berkorelasi lemah. Sutrisno Hadi (2004), menyatakan bahwa arah hubungan positif antar variabel terjadi jika naiknya skor variabel X selalu diikuti dengan naiknya skor variabel Y, atau jika turunnya skor variabel X

selalu diikuti dengan turunnya skor variabel Y. Dalam penelitian ini jika terjadi kenaikan nilai korelasi Pearson peran serta pemegang IPHHK (Y) dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat sebesar 0,313 atau 30% maka akan terjadi kenaikan nilai korelasi Pearson sosial ekonomi masyarakat akan terjadi peningkatan secara bertahap sebesar 0,313 atau 30%.

KESIMPULAN

Peran serta pemegang Izin Pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) terhadap peningkatan sosial ekonomi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manokwari periode 2018-2021 masih relatif rendah (28,57%). Terdapat korelasi keberadaan IPHHK terhadap peningkatan sosial ekonomi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manokwari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Masyarakat Hukum Adat serta para pemegang ijin IPHHK di 14 Kampung di Distrik Sidey, Masni, dan Manokwari Utara yang telah membantu memberikan data dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Ketua Program Studi Magister Kehutanan atas ijin yang diberikan untuk kegiatan pengumpulan data lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakarbessy CA. 2018. Persepsi dan partisipasi masyarakat lokal pada pengelolaan hasil hutan kayu yang ramah lingkungan di hutan produksi Distrik Manokwari Utara Kabupaten Manokwari. [Tesis]. Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Papua.
- Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. 2022. Kertas kerja rekonsiliasi dana bagi hasil provisi sumber daya hutan tahun 2017 - 2021. Laporan tahunan.
- Incas. 2015. Dugaan emisi bersih tahunan GRK dari penggunaan lahan lahan dan perubahan penggunaan lahan di hutan dan lahan gambut akibat ulah manusia selama 2001-2012. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kaihatu TS. 2006. Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(1): 1-9.
- Merindakang NM, et al. 2022. Estimasi produksi dan peredaran kayu olahan lokal berdasarkan penerbitan izin pemungutan hasil hutan kayu di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Kehutanan Papuaasia*, 8(1): 55 – 66.
- Moleong LJ. 2007. Metodologi penelitian kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Paririe FD. et al. 2019. Tingkat pendapatan pengusaha kayu gergajian berdasarkan margin keuntungan dan alur pemasaran kayu lkal di Distrik Manokwari Utara. *Jurnal Kehutanan Papuaasia*, 5(2): 196–206.
- Sugiyono. 2013. Metode penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif. Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Triestini, Y, Nugroho B, Siburian R. 2020. Trend PNBK sektor kehutanan Provinsi Papua Barat pasca implementasi kebijakan si-puhh online dan self assesment. *Cassowary*, 3(1): 1 – 10.